

# DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA TERHADAP KEBIJAKAN MINIMUM ESSENTIAL FORCE DI KEMENTERIAN PERTAHANAN

## INDONESIA'S DEFENSE DIPLOMACY TOWARDS MINIMUM ESSENTIAL FORCE POLICY IN MINISTRY OF DEFENSE

Isna Fachrur Rozi Iskandar<sup>1</sup>, Makarim Wibisono<sup>2</sup>, Supandi<sup>3</sup>

Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Unhan

(izna.fachrurrozi@gmail.com)

**Abstrak** -- *Minimum Essential Forces* adalah kebijakan pembangunan postur pertahanan negara yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2010 yang terdiri dari tiga renstra hingga tahun 2024. Kebijakan tersebut dicanangkan atas dasar dinamika lingkungan strategis, ancaman, dan kekuatan nasional. Dalam kondisi saat ini dimana pengembangan pertahanan negara merupakan hal yang vital, oleh karena itu realiasi terhadap hal tersebut adalah hal yang vital. Diplomasi Pertahanan sendiri sebagai sarana *non-violence use of military power* menjadi salah satu instrumen dalam perwujudan hal tersebut. Bagaimana Diplomasi pertahanan berperan dalam realisasi hal tersebut menjadi focus pada penelitian ini melalui fungsi dari diplomasi pertahanan itu sendiri yaitu, *confidence building measure, defense capabilities*, dan Industri pertahanan. Analisa data akan dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data sebanyak – banyak untuk kemudian dilakukan reduksi dan Analisa terkait data yang relevan dalam penelitian ini. Hasil yang ditemukan adalah Diplomasi Pertahanan memberikan dampak yang signifikan dalam realisasi kebijakan MEF, dimana Diplomasi Pertahanan dapat menjembatani pengelolaan pandangan yang didalamnya melalui hubungan sipil militer domestik, dan militer asing – domestik serta kemajuan teknologi dan pengetahuan terkait bidang pertahanan. Yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk pilihan strategi pengembangan pertahanan negara menuju ke arah yang Ideal (*Essensial Forces*)

**Kata kunci:** *diplomasi pertahanan, kualitatif, minimum essential force*

**Abstract** -- *Minimum Essential Force* is Indonesia's policy in term of building defense postur which in motion since 2010 consist of three strategic planing untill 2024. Said policy undelining several aspects from the dynamic of strategic environment, threat, and national power. Realizing the importance of managing and improving defense capabilities, realization of said policy is vital. Defense Diplomacy as non – violence uses of military power become one of the instrumen that contribute greatly which become the focus of this research through its function in *confidence building measure, defense capabilities*, and defense industry. Data analysis conducted with qualitative method to collect then reduce to obtain relevant data. This research concluded that defense diplomacy contributes greatly in realization of MEF whereas Defense Diplomacy able to bridge perception in civil – military relation and foreign military relation and contribute to improvement in defense technology and knowledge. In days to come, Defense Diplomacy as an instrumen will continue its role in establishing Indonesia's Defense Capabilities to Ideal level.

**Keywords:** *defense diplomacy, minimum essential force, qualitative*

---

<sup>1</sup> Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

<sup>2</sup> Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

<sup>3</sup> Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

## Pendahuluan

**A**pa yang dituliskan oleh Thucydides menjadi landas pikir pemikir realisme hingga saat ini, dimana elemen militer, ekonomi, dan politik merupakan hal yang penting dalam pemenuhan kepentingan negara, dan menjaga kedaulatan negara<sup>4</sup>. Lingkungan internasional yang berkembang setelahnya hingga tercetusnya piagam PBB, dimana negara – negara merasa bahwa perang membawa kemunduran yang besar dalam berbagai aspek, membetuk sebuah konfigurasi kekuatan yang baru dimana organisasi internasional memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi dan mengatur gerak negara – negara. Namun demikian bukan berarti kekuatan militer kehilangan relevansinya sebagai instrumen negara yang berdaulat. Dalam buku putih pertahanan Indonesia dituliskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di posisi yang strategis perpotongan anantara dua samudera dan dua benua. Disamping itu Indonesia juga berbatasan laut dan daratan dengan sepuluh negara, dan

merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah baik di daratan maupun lautan. Oleh karena itu sudah menjadi tujuan Indonesia untuk menjaga kedaulatan teritorialnya dari ancaman – ancaman yang datang dimana instrumen militer sangat relevan digunakan sebagai alat untuk menjaga pertahanan Indonesia.

Tidak hanya itu saja, sebagai dampak dari masuknya globalisasi dimana kemajuan teknologi membuat sistem internasional yang saling terkait antara satu dan lainnya, negara – negara sudah tidak dapat lagi bergerak secara “*independent*”<sup>5</sup>. Satu kebijakan negara akan memiliki dampak terhadap kebijakan yang lainnya. Hal ini membuka jalan baru dalam bentuk kerja sama antar negara dan juga melahirkan karakteristik ancaman baru seperti kebangkitan dari *non-state aktor* dan juga melahirkan *non-traditional threats*. Yang mana dalam konteks kebijakan luar negeri terkait ancaman *non-traditional*, dinamika yang dihadirkan bisa sangat dinamis. Tidak seperti konsep negara bangsa dimana ada batas wilayah negara yang berdaulat sebagai bentukan territorial, ancaman yang datang dari *non-*

---

<sup>4</sup> R. Warner & In Finley . *Thucydides History of the Peloponnesian War*. (Harmondsworth, Eng: Penguin Books, 1972).

<sup>5</sup> UK Essays Writer, “The Shrinking World Due to Globalisation Business Essay. Dalam

<https://www.ukessays.com/essays/business/the-shrinking-world-due-to-globalisation-business-essay.php?cref=1>, diakses pada 25 maret 2018.

*state aktor* dapat bersifat lintas batas tanpa harus berbatas pada batasan konsep negara bangsa. Oleh karena itu Indonesia dalam konteks kebijakan luar negerinya perlu menyelaraskan dan dinamis dengan konteks dunia internasional saat ini. Yang mana dalam buku putih pertahanan Indonesia di deskripsikan sebagai ancaman militer, nir militer, dan hibrida sebagai hasil dari perkembangan dinamika ancaman saat ini.

Untuk menanggapi dinamika ancaman tersebut, pembangunan kekuatan pertahanan menjadi hal yang bersifat berkelanjutan. Namun pengembangan kekuatan militer negara terutama Indonesia, yang elemen – elemen kekuatan nasional yang besar akan memberikan reaksi terhadap negara – negara lain. Hal tersebut menjadi lumrah mengingat kompetisi yang terjadi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat pada saat perang dingin, memberikan efek hingga penjuruan dunia. Sebagai sebuah negara pandangan dalam pemenuhan kepentingan nasional adalah hal yang mutlak, oleh karena itu perbenturan kepentingan, terutama terkait masalah keamanan akan menstimulasi keberadaan lahirnya *arms race*. Disisi lain pengembangan kekuatan militer bukan lah hal yang murah, dikarenakan

pengembangan kekuatan militer akan berkaitan dengan ragam aspek negara yang harus dipertahankan sesuai dengan kepentingan nasional dari negara tersebut dan ketersediaan anggaran. Hal ini melahirkan fenomena *gun and butter* dimana satu sisi negara perlu mensejahterakan dan di sisi lain negara juga perlu untuk mempertahankan kedaulatan negaranya.

Dengan konstelasi geografis yang luas disertai kekayaan sumber daya alam, jumlah populasi yang memiliki kemajemukan yang tinggi serta model negara Indonesia yang berbentuk negara kepulauan akan mengundang spektrum ancaman yang beragam. Oleh karena itu Indonesia memerlukan alat militer sebagai *tools* harus profesional dan mapan sehingga dapat menangkalkan semua ancaman yang datang. Pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia melahirkan kebijakan *Minimum Essential Force* sebuah bentuk kekuatan pokok minimum. *Minimum Essential Force* ini dalam beberapa persepsi menarik banyak argumen dikarenakan kata *minimum* yang digunakan, yang mana Indonesia seharusnya tidak membangun kekuatan yang minimum namun membangun kekuatan yang optimal. Akan tetapi dalam

proses perumusan kebijakan tersebut *Minimum Essential Force* terdiri dari dua kata yaitu *Minimum Essential* yang mana merupakan kekuatan yang minimum dan esensial. Berkaca pada aksi dan reaksi yang ada di dunia terkait perkembangan kekuatan militer satu negara yang dapat berdampak kepada ragam aspek negara tersebut, seperti embargo militer dan atau ekonomi. Oleh karena itu dalam perumusannya *Minimum Essential Force* sendiri dalam penamaanya ditujukan kepada dua hal penting yang masuk akal apabila kita berkaca pada latar belakang Indonesia dan reaksi asing, yaitu, untuk mencegah lahirnya *arms race* di Kawasan, dan agar publik lebih mudah menerima kebijakan tersebut.

*Minimum Essential Force* sendiri merupakan sebuah reformasi pertahanan Indonesia yang didalamnya meliputi alutsista, sumber daya manusia, pangkalan, dan tempat latihan pasukan, yang ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan Indonesia. Semenjak dijalankannya kebijakan MEF ini, anggaran pertahanan Indonesia

mengalami peningkatan yang signifikan walaupun ada kata *Minimum* dalam kebijakan MEF ini. TNI sebagai kekuatan militer Indonesia dalam pengembangan kapabilitasnya ditujukan untuk memiliki daya tangkal, dan bukan daya serang. Terjadi perubahan – perubahan yang signifikan terkait peremajaan alutsista yang sudah tidak layak operasi yang juga disertai dengan pembangunan elemen pengawasan dan pemeliharanya guna meningkatkan profesionalisme TNI dalam menangkal ancaman – ancaman yang datang. MEF dalam pemenuhanya dibagi menjadi tiga renstra hingga tahun 2024. Dalam *Strategic Defense Review* tahun 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginisiasi kelahiran MEF dalam pembahasan strategi pertahanan dalam ragam aspek, yang memiliki kaitan dengan pembangunan pertahanan nasional yang memiliki sifat yang defensif<sup>6</sup>. MEF ini sendiri memiliki tiga komponen utama dalam perumusannya yang pertama adalah<sup>7</sup>, *capability-based planning* dimana dalam pemenuhan kapabilitas pertahanan negara perlu

---

<sup>6</sup> Muhammad Ridwan, “Karya Monumental SBY di Bidang Militer | Selamat HUT TNI Ke-69”, dalam <https://www.kompasiana.com/ridwan78/54f4570c7455137b2b6c8a7f/karya-monumental-sby-di-bidang-militer-selamat-hut-tni-ke-69>. diakses pada 17 November 2018.

<sup>7</sup> Lampiran Pertauran Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Penyelarasan *Minimum Essential Force* Komponen Utama.

menyadari kapabilitas yang dimiliki pada saat ini hal ini utamanya ditujukan pada keterbatasan anggaran dan optimalisasi anggaran tersebut untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan negara. Yang kedua adalah *Threat Based Planning*, pemenuhan kapabilitas pertahanan akan diarahkan kepada kemungkinan ancaman yang akan dihadapi oleh Indonesia, mengingat pasca masuknya globalisasi dan menyempitnya dunia, spektrum ancaman semakin luas dengan aktor yang kian beragam. Yang ketiga adalah *Flash Point*, Indonesia merupakan negara yang luas dengan model negara kepulauan (*archipelago country* – UNCLOS), sehingga Indonesia memiliki potensi ancaman asing yang besar seperti pelanggaran teritori dan atau klaim wilayah sehingga kapabilitas pertahanan Indonesia perlu dibangun berdasar penangkalan ancaman di titik – titik tertentu. Ketiga hal tersebut menjadi landas pikir dalam perumusan kebijakan MEF yang dijalankan oleh Indonesia.

Dalam konstelasi negara saat ini, peningkatan kekuatan militer akan memberikan reaksi dari negara – negara di Kawasan, namun bukan berarti

peningkatan kapabilitas militer menjadi hal yang tidak relevan. Dunia akan selalu bergerak, dan seiringnya perkembangan teknologi, alutsista jenis baru akan terus dikembangkan, yang pada akhirnya, peremajaan terhadap alutsista yang dimiliki akan menjadi sebuah siklus yang terus berulang. Menilik kembali ke dua perang besar yang pernah terjadi di sejarah dunia, negara – negara setuju bahwa perang militer, merupakan hal yang sangat merugikan, namun keamanan dan pertahanan sebuah negara sebagai negara yang berdaulat juga merupakan hal yang penting. Namun hingga saat ini pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia dalam kerangka MEF mengalami pasang surut, antaranews melansir bahwa Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menargetkan renstra tahap kedua di akhir 2019 akan diupayakan untuk mencapai target 72% pemenuhan<sup>8</sup>. Lanjut dilansir KSAD Jenderal TNI Mulyono pada sambutannya di HUT TNI ke 73 mengatakan bahwa renstra MEF pada tahun 2018 sudah mencapai 61.9% dan selaras dengan yang disampaikan oleh Panglima TNI diharapkan pada renstra 2 (2015-2019) akan mencapai 72 % yang sesuai dengan

---

<sup>8</sup> Syaiful Hakim, “Panglima TNI: MEF 2019 Capai 72 Persen”, dalam <https://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/755153/panglima-tni-mef-2019-capai-72->

[persen?utm\\_source=antaranews&utm\\_medium=nasional&utm\\_campaign=antaranews](https://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/755153/panglima-tni-mef-2019-capai-72-) diakses pada 25 november 2018.

target pemerintah<sup>9</sup>. Hal tersebut merupakan manifestasi dari kehadiran alutsista baru yang akan hadir di tanah air pada akhir 2019 seperti rudal TNI AD, kapal selam TNI AL, Pesawat CN235 TNI AL dan TNI AU serta pesawat tempur Sukhoi 35 TNI AU<sup>10</sup>.

Dalam lampiran kebijakan penyesuaian *Minimum Essential Force* komponen utama disebutkan beberapa resiko yang dapat diterima Indonesia apabila MEF tidak terpenuhi, adapun kemungkinan resiko tersebut adalah<sup>11</sup>;

- a. Ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI semakin besar dan berdampak pada stabilitas nasional.
- b. Tidak tercapainya program pembangunan nasional bidang pertahanan negara.
- c. Posisi tawar (*bargaining position*) pemerintah Indonesia dalam diplomasi internasional melemah dan kurang diperhitungkan oleh masyarakat internasional.
- d. Tidak terpenuhinya pembangunan MEF Komponen Utama mengakibatkan

menurunnya daya tangkal (*deterrence*) pertahanan negara di kawasan.

- e. Menurunnya posisi daya saing bangsa (*Competitive Index*) di lingkungan internasional.
- f. Berkurangnya kemampuan TNI didalam melaksanakan tugas pokoknya.

Mengingat faktor resiko yang dapat berdampak vital terhadap Indonesia, maka MEF merupakan hal yang signifikan untuk dipenuhi. Oleh karena itu dalam rangka pemenuhan MEF instrumen diplomasi diperlukan untuk mendukung realisasi kebijakan tersebut.

Secara alamiah kekuatan diplomasi dan kekuatan militer adalah dua bagian penting dari kenegaraan, yang mana pemerintah yang berkuasa akan menggunakan instrument tersebut untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dan mengagendakan untuk selalu memperkuat kedua hal tersebut sebagai instrumen yang mumpuni dikarenakan kedua hal tersebut merupakan hal yang vital dalam konstelasi dunia saat ini<sup>12</sup>. Diplomasi secara verbal memiliki kekuatan untuk menyampaikan realita yang dapat

---

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Hermanta. "TNI Targetkan Akhir 2019 Akan Capai 72% MEF", dalam [http://rri.co.id/pontianak/post/berita/580514/daerah/tni\\_targetkan\\_akhir\\_2019\\_akan\\_capai\\_72\\_mef.html](http://rri.co.id/pontianak/post/berita/580514/daerah/tni_targetkan_akhir_2019_akan_capai_72_mef.html), diakses pada 29 November 2019.

<sup>11</sup> Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Penyesuaian *Minimum Essential Force* Komponen Utama.

<sup>12</sup> Angelo Codevilla, "Tools of Statecraft: Diplomacy and War", dalam <https://www.fpri.org/article/2008/01/tools-of->

membuat sebuah negara tergerak, sementara militer secara fisik (bukan dalam konsep perang) juga memiliki kekuatan yang sama, sehingga kedua elemen ini merupakan alat penting bagi pemerintah untuk memenuhi kepentingan nasional<sup>13</sup>. Kedua instrument ini saling mengisi satu sama lain, dimana diplomasi menyampaikan sebuah realita, dan operasi yang dilakukan oleh instrument militer membuat realita tersebut.

Dalam pandangan yang populer diplomasi dipandang sebagai sebuah jalan damai sebagai alternatif pilihan negara dalam memenuhi kepentingan nasionalnya, dan bahkan diplomasi sendiri digunakan untuk mencegah terjadinya perang. Kekuatan diplomasi negara pada akhirnya akan memiliki peranan kunci sebagai ujung tombak yang dapat mempengaruhi posisi tawar sebuah negara. Secara konvensional penggunaan kekuatan militer adalah perang. Perang sendiri memiliki tujuannya masing – masing, yang mana salah satunya adalah untuk mendapatkan perdamaian yang subjektif menurut pihak – pihak yang berperang. Menilik dari sejarah dunia kebelakang, kedua hal tersebut adalah hal yang mungkin. Namun peperangan pada

akhirnya bukan jalan yang saat ini didambakan banyak negara. Oleh karena itu sebagai alternatif dari hal tersebut diplomasi muncul.

Namun dalam perjalanannya perbedaan kepentingan antar negara akan lebih memainkan peranan dalam proses negosiasi. Kepentingan yang diusung oleh masing – masing negara tersebut membuat diplomasi harus bergerak secara konsisten dan dinamis. Diplomasi sebagai sebuah muara dari kekuatan nasional yang disampaikan secara verbal guna memenuhi kepentingan nasional, akan mendorong terwujudnya kebijakan – kebijakan pemerintah.

John Quincy Adams pernah mengatakan bahwa, dalam proses negosiasi sebenarnya setiap negara sudah saling paham apa yang diinginkan oleh masing – masing negara. Oleh karena itu dalam proses negosiasi bisa dikatakan seperti sebuah permainan kartu dimana pihak – pihak yang bermain sudah mengetahui kartu apa saja yang dimiliki oleh pihak lain. Indonesia dengan kontelasi geografis yang luas dan ragam potensi kekuatan nasional yang besar dapat mendukung kekuatan nasional. Guna menjaga dan memelihara potensi

---

statecraft-diplomacy-and-war/ diakses pada 5 Januari 2019.

<sup>13</sup> *Ibid.*

kekuatan nasional tersebut dibutuhkan kekuatan pertahanan yang handal. Dengan menyadari pentingnya kekuatan diplomasi yang dalam hal ini adalah diplomasi pertahanan dan kekuatan militer dalam kerangka *non-violence use of military power* yang dapat meningkatkan *bargaining power* negara dan serta meningkatkan efek *deterrence*, sebagai dua instrument penting dalam pemenuhan pertahanan negara yang saling mengisi dan membangun. Maka kebijakan *Minimum Essential Force* yang telah dijalankan oleh Indonesia akan dapat terealisasi melalui refleksi kekuatan diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia. Diplomasi pertahanan seperti yang disampaikan oleh Syawfi, memiliki fungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memenuhi kepentingan yang ingin dicapai melalui pembangunan *Confidence Building Measure, Defense Capabilities*, dan Industri Pertahanan. Dan juga Diplomasi Pertahanan memiliki elemen *soft power* di dalamnya yang dapat menyentuh ranah domestik dan Internasional seperti yang dituliskan oleh Gregory Winger.

## Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang ditulis oleh Creswell, dalam penelitian kualitatif dapat dilihat refleksi peneliti serta peran peneliti dalam menganalisa dan menginterpretasi data. Dalam penelitian ini peneliti melandaskan penelitian dengan menggunakan Fenomenologi<sup>14</sup>. Disamping fenomenologi ada juga ragam metodologi penelitian lainnya seperti, *Grounded Theory, Fenomenology, narrative research* dan Ethnografi. Namun dalam penelitian ini, peneliti merasa bahwa Fenomenologi paling cocok dikarenakan hal tersebut berdasar pada sesuatu yang umum dalam kelompok tertentu. Pendekatan ini memiliki tujuan fundamental untuk mendeskripsikan secara alamiah sebuah fenomena tertentu<sup>15</sup>. Dengan memahami fenomena yang terjadi dapat memberikan peneliti *input* dalam subjek yang diteliti, berikut peran, fungsi, dan implikasi yang terjadi dalam pengambilan keputusan tertentu terhadap komunitas tertentu. Lanjut Creswell menulis bahwa pendekatan fenomenologi memiliki kaitan yang erat terkait esensi dari pengalaman

---

<sup>14</sup>J. W. Creswell, *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach*, (Los Angeles: Sage, 2009), Hal 20.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hal 99.



akan fenomena tertentu yang dialami oleh partisipan<sup>16</sup>. Adapun prosedur yang dilakukan melingkupi studi terhadap beberapa persoalan kemudian dilakukan proses pengaitan yang panjang untuk melihat hubungan diantaranya<sup>17</sup>. Dalam penelitian ini, peneliti mencari esensi dari setiap pengalaman (data) yang berhubungan dengan realisasi kebijakan *Minimum Essential Force* melalui instrumen Diplomasi Pertahanan. Sumber data yang digunakan meliputi hasil wawancara, hasil seminar, hingga analisa dari para pakar dan pelaku baik berkenaan dengan *Minimum Essential Force*, Diplomasi Pertahanan, dan relasi keduanya yang tertuang dalam beragam pandangan. Melalui data – data - data tersebut, peneliti akan mengolah dan mencoba menarik hubungan diantara kedua hal yang menjadi objek penelitian dalam tesis ini.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Kementerian Pertahanan Republik Indonesia**

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, adalah Kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi hal – hal terkait urusan pertahanan. Kementerian Pertahanan merupakan

salah satu Kementerian yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 yang tidak dapat diubah ataupun dibubarkan oleh Presiden Bersama dengan dua kementerian lainnya yaitu Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri<sup>18</sup>. Oleh karena itu Menteri Pertahanan Bersama – sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri akan memiliki wewenang untuk bertugas sebagai pelaksana tugas Kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau sudah tidak lagi dapatmelakukan kewajibanya dalam masa jabatannya. Saat ini Menteri Pertahanan Republik Indonesia sejak 27 oktober 2014 dijabat oleh Ryamizard Ryacudu.

Kementerian pertahanan dalam menjalankan agenda pertahanan negara memiliki dua produk yang dapat diakses oleh khalayak umum, yaitu Kebijakan Pertahanan Negara, dan Buku Putih Pertahanan Negara. Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian pertahanan pada tahun 2015 disebutkan bahwa kebijakan pertahanan negara diimplementasikan melallui berbagai upaya dalam pengelolaan sumber daya dan sarana

---

<sup>16</sup> *Op. cit.*, hlm.13 .

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm,13.

<sup>18</sup> UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 8 Butir 3.

prasarana nasional guna mengatasi bentuk ancaman<sup>19</sup>. Adapun yang menjadi landas dari kebijakan tersebut adalah visi dan misi pemerintah dalam pembangunan nasional yang juga tersirat dalam pembangunan pertahanan negara dengan tujuan untuk terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi – misi pembangunan terkait pertahanan tersebut dijabarkan dengan lebih spesifik kedalam tujuh misi pembangunan yaitu<sup>20</sup>;

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang keandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas – aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritime yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Dalam pelaksanaan hal – hal tersebut Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2015 pun memiliki prioritas yang mana ditujukan agar Indonesia memiliki kedaulatan secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Adapun hal – hal tersebut terkandung dalam Sembilan agenda prioritas pertahanan negara yang yaitu<sup>21</sup>;

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Indonesia
2. Menghilangkan keabsenan pemerintah melalui pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka NKRI
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem

---

<sup>19</sup> Kementerian Pertahanan, “Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015” (Jakarta: Kemhan RI,2015), Hal 35.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hal 36.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hal 37.

- penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
  6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
  7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector – sector strategis ekonomi domestic
  8. Melakukan revolusi karakter bangsa
  9. Memperkuat kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Kehadiran negara dan koordinasi antar Kementerian akan dibutuhkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara yang handal dan memiliki efek tangkal terhadap ancaman yang datang, oleh karena itu keselarasan dalam tatanan kebijakan dibutuhkan untuk membangun ketersinambungan dan pertahanan yang mewadahi semua sektor.

Sementara itu kebijakan pertahanan negara tahun 2018 melalui keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/1008/M/V/2017 diputuskan bahwa pertahanan negara diselenggarakan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan

gangguan terhadap keutuhan bangsa dan dengara dari segala bentuk ancaman. Yang mana penyelenggaraan pertahanan dilakukan secara semesta yang menempatkan TNI sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung<sup>22</sup>. Sementara Lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan difungsikan sebagai unsur utama dalam menghadapi ancaman non militer yang didukung oleh unsur – unsur lain dari kekuatan bangsa. Dengan implementasi dari sistem dan pertahanan negara yang bersifat semeta. Dalam kebijakan pertahanan negara ini di dalamnya terdapat pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum (MEF). Dalam poin 5 pedoman umum pengelolaan pertahanan negara terkait kebijakan pertahanan negara yang ditujukan guna terwujudnya tujuan dan sasaran startegis pertahanan. Kebijakan pembangunan pertahanan negara ditujukan untuk membangun kekuatan pertahanan Tangguh yang memiliki kemampuan penangkalan sebagai negara kepulauan dan negara maritime dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan segenap bangsa Indonesia. Pembangunan postur

---

<sup>22</sup> Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2018.

pertahanan negara Indonesia mengadopsi prinsip defensif aktif, demi terwujudnya pertahanan di bidang militer dan nirmiliter, militer sendiri di dalamnya terkait kebijakan pembangunan kekuatan pokok minimum yang menuju kepada kekuatan esensial TNI yang meliputi penyiapan kekuatan, kemampuan dan gelar di seluruh wilayah NKRI.

Disamping itu pembangunan di bidang kerjasama internasional dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Kementerian Lembaga terkait untuk mempercepat pberwujudan komunitas politik dan keamanan di Kawasan dalam bingkai *ASEAN Politic and Security Community*. Melalui instrument diplomasi dan dialog terkait isu pertahanan strategis, keamanan, kemitraan strategis, dan pemeliharaan perdamaian dunia di betbagai Kawasan. Industri pertahan pun menjadi sorotan dengan tujuan untuk membangun industri yang kuat, mandiri, dan berdaya saing dalam pemenuhan Alpalhan, serta komponen – komponen dan peralatan pendukung yang didalamnya termasuk pemeliharaan dan perbaikan. Diversifikasi di bidang indhan sendiri dilakukan melalui pembangunan struktur industri dan kerjasama dengan industri asing untuk meningkatkan kapabilitas dan teknologi indhan

domestic dimana KKIP menjadi salah satu pihak yang terlibat.

Dari penjabaran diatas Kementerian Pertahanan Indonesia memiliki peranan vital dalam pembangunan pertahanan negara melalui ragam instrument. Oleh karena itu Kementerian Pertahanan selaku perumus kebijakan pertahanan dan juga salah satu aktor Diplomasi Pertahanan. Dalam perumusan kebijakan pembangunan postur pertahanan dalam kerangka *Minimum Essential Force* merupakan hal yang dapat mendukung teroptimalisasinya Diplomasi Pertahanan, seperti Diplomasi Pertahanan juga mendukung *Minimum Essential Force* itu sendiri.

### **Kebijakan Minimum Essential Force**

*Minimum Essential Force* (MEF) dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesian no 10 tahun 2012 adalah sebuah amanat pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 yang berdasar pada peratruran Presiden Nomor 5 tahun 2010. Satu tahun sebelumnya pada *Strategic Defense Review* ditetapkan pokok -pokok pikiran serta remondasi terhadap langkah – langkah strategis dalam mewujudkan suatau kekuatan pokok minimum yang telah ditetapkan

dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 tahun 2010 sebagai bagian dari postur ideal pertahanan negara. Adapun kepentingan utama penyelarasan MEF ini ditujukan untuk mengoreksi faktor perencanaan, mekanisme penyelenggaraan, dan anggaran pertahanan yang tidak menyimpang dari sistem manajemen pengambilan keputusan berdasar pada tataran kewenangan pertahanan negara. Adapun unsur – unsur yang menjadi sasaran terdiri dari sumber daya manusia, materiil (Alutsista), sarana prasarana pangkalan, daerah latihan, industri pertahanan, organisasi, dan anggaran. Hal tersebut dijadikan pedoman bagi penyusunan kebijakan terkait pembangunan postur TNI, khususnya *Minimum Essential Force* bagi Komponen Utama<sup>23</sup>.

Penyelarasan *Minimum Essential Force* sendiri merupakan sebuah upaya terobosan yang diambil guna menghindari kendala yang muncul terkait anggaran dalam perwujudannya. Pada kenyataannya MEF sendiri dibangun untuk memberikan refleksi kekuatan yang optimal terhadap pemberdayaan sumber daya nasional yang tersedia yang diselaraskan dengan kemampuan sumber – sumber

perekonomian negara. MEF sendiri merupakan sebuah bentukan strategi pembangunan postur kekuatan komponen utama yang diarahkan menuju ideal dan tidak diarahkan sebagai bentukan *arms race* maupun strategi pembangunan yang ditujukan untuk memenangkan perang total namun sebagai pembangunan kekuatan pokok yang terstandarisasi dan memiliki efek tangkal.

Dengan menyadari adanya keterbatasan sumber daya, pembangunan MEF diarahkan dengan merevitalisasi Industri pertahanan yang diharapkan dapat menghadapi ancaman actual dalam bentukan skala prioritas tanpa mengesampingkan ancaman potensial yang datang dalam kerangka dimana TNI dapat melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP)<sup>24</sup>. Problematika lain yang dihadapi oleh MEF disamping aspek penentuan ancaman, adalah aspek perencanaan, aspek mekanisme penyelenggaraan, aspek anggaran, dan aspek manajemen dalam pengambilan keputusan MEF yang mencakup personel dan organisasi.

---

<sup>23</sup> Kebijakan Penyelarasan *Minimum Essential Force* 2012, No 650.

<sup>24</sup> *Ibid.*

Pembangunan MEF sendiri juga akan berdasar pada Trimatra Terpadu yang merupakan landas dasar dari MEF sendiri, sehingga dalam implementasinya akan dilakukan secara bertahap melalui empat strategi pengembangan MEF yaitu Rematerialisasi, Revitalisasi, Relokasi, dan Pengadaan. Dengan dilenngkapi kebijakan pengembangan personel TNI dengan prinsip *zero growth policy* dan *right sizing* dan pertimbangan terhadap aspek organisasi. Prinsip tersebut digunakan untuk dapat meningkatkan profesionalitas TNI yang dalam membentuk komposisi personel TNI yang Tangguh dan handal. Dengan pembangunan postur pertahanan ini, NKRI akan mendapatkan asupan besar dalam pemenuhan kepentingan nasionalnya yang kemudian terakumulasi dalam kekuatan nasional Indonesia. Dalam pertahanan dan penangkalan ancaman yang datang yang dapat terealisasi melalui instrumen Diplomasi Pertahanan.

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas hasil penelitian terkait Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Kebijakan *Minimum Essential Force* di Kementerian Pertahanan. Merunut

kepada konsep Diplomasi Pertahanan yang ditulis oleh Idil Syawfi pada tahun 2009, Diplomasi pertahanan merupakan sebuah sarana yang digunakan untuk membangun kepercayaan diri negara (*confidence building measure*), pengembangan dan pembangunan kapabilitas pertahanan (*defense capabilities*), dan diplomasi pertahanan sendiri merupakan sarana dalam membangun Industri Pertahanan<sup>25</sup>. Diplomasi pertahanan juga merupakan sebuah bentukan *soft power* senada dengan yang ditulis oleh Gregory Winger dalam *The Velvet Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy* dimana diplomasi pertahanan merupakan non-violence use of military power yang memiliki relasi yang *inward* dan *outward*<sup>26</sup>. Dalam hubungan kedalam diplomasi pertahanan dapat dilakukan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam hal Humanitarian Act and Disaster Relief (HADR) dan misi – misi publik lainnya yang bertujuan untuk membangun opini publik guna mendukung sebuah tujuan tertentu, sementara itu secara *outward* dapat berwujud dalam pertukaran perwira, *join*

---

<sup>25</sup> Idil Syawfi, *Aktifitas Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), Hal 34.

<sup>26</sup> Gregory Winger. *The Velvet Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy* ,dalam <http://www.iwm.at/publikations/5-junior-visiting-fellows-conferences/vol-xxxiii/the-velvet-gauntlet/>, diunduh pada 6 Juni 2018.

*exercise, join patrol*, atau transfer teknologi dalam cakupan industri pertahanan. Oleh karena itu kedua teori ini bisa dikatakan menjadi sebuah kesatuan konsep diplomasi pertahanan, dikarenakan, hal – hal tersebut juga mendorong terciptanya kepercayaan diri, peningkatan keabilitas pertahanan, dan pembangunan industri pertahanan itu sendiri.

*Minimum Essential Force* sendiri yang merupakan produk dari Kementerian pertahanan tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari kekuatan nasional, diplomasi negara, kerjasama antar negara, dan serta konstelasi kekuatan organisasi internasional. Morgenthau dalam tulisannya yang berjudul *The Balance of Power in Asia* menulis bahwa elemen – elemen kekuatan nasional terdiri dari geografi, sumber daya alam, kapasitas industri, kesiapan militer, populasi, karakter bangsa, moral bangsa, dan kualitas diplomasi sebuah negara sebagai katalis dalam penyaluran kekuatan nasional tersebut<sup>27</sup>. Oleh karena itu MEF sendiri akan bergantung kepada elemen –

elemen kekuatan nasional tersebut dalam proses pemenuhannya. Disamping itu kita juga perlu menyadari bahwa negara – negara memiliki kepentingan nasional yang wajib dipenuhi. Hal ini menyebabkan bentrokan antar kepentingan adalah hal yang lumrah terjadi, namun Keohane dalam *Functional Theory of Regime* melihat negara dalam pandangan yang realis dimana negara – negara akan berkompetisi dalam pemenuhan kepentingan nasionalnya, namun ia juga menggabungkan elemen institusionalis, dimana peran sebuah institusi seperti organisasi internasional yang mawadahi negara – negara dapat membantu terjadinya sebuah harmoni<sup>28</sup>. Hal tersebut mendorong negara – negara yang memiliki pandangan realis untuk bekerjasama demi terciptanya kepentingan yang kolektif selama hal tersebut juga memberikan input positif terhadap pemenuhan kepentingan nasional negara masing – masing dimana utilisasi terhadap instrumen diplomasi dan diplomasi pertahanan negara dibutuhkan.

---

<sup>27</sup> Francis P. Sempa. "Hans Morgenthau And The Balance of Power in Asia", dalam <https://thediplomat.com/2015/05/hans-morgenthau-and-the-balance-of-power-in-asia/>, diakses pada 7 Juli 2018.

<sup>28</sup> Robert Keohane, *Functional Theory of Regime*, Dalam *Berkeley Journal of International Law. Cooperation in International Relations: A Comparison of Keohane, Haas, and Franck*. (1996). Volume 4 Issue 1 Article 5. Hal 225.

Peneliti juga mengambil aspek rasional dari para pengambil keputusan dalam sebuah negara, senada dengan yang ditulis oleh Allison dalam *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis* dimana aktor akan melandaskan pemikirannya terhadap hal yang rasional. Dengan konsep dasar yang terdiri dari *Goals, Objectives, Alternatives, Consequences, dan Choices* sebagai bahan pemikiran setiap aktor pengambil keputusan<sup>29</sup>.

Dengan menyadari hal – hal tersebut, realisasi kebijakan *Minimum Essential Force* akan memberikan efek *deterrence* terhadap pihak lain, seperti yang dituliskan oleh Jervis, efek *deterrence* dapat memiliki dampak yang negatif, apabila salah sasaran<sup>30</sup>. Hal ini dikarenakan kesalahan persepsi dari pihak yang memberikan dan menerima. Oleh karena itu pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia perlu dikomunikasikan melalui instrumen diplomasi pertahanan berdasar fungsinya untuk membangun rasa saling percaya (CBM) sehingga terfokus pada apa yang menjadi tujuan Indonesia dalam pembangunan kekuatan pertahanannya.

## **Kebijakan *Minimum Essential Forces* di Kementerian Pertahanan**

Kebijakan *Minimum Essential Force* adalah kebijakan pembangunan postur pertahanan militer yang ditujukan untuk menjalankan agenda – agenda pertahanan negara. MEF sendiri berangkat dari pertimbangan pertahanan yang detail. Yang menjadi referensi dari pembangunan MEF ini sendiri adalah konstelasi ancaman yang akan dihadapi mengingat kapabilitas militer harus mampu menghadapi segala jenis ancaman, ancaman – ancaman tersebut terklasifikasi sebagai ancaman militer, nirmiliter, dan hibrida dengan aktualitas ancaman nyata dan ancaman tidak nyata. Lalu MEF sendiri memiliki referensi dimana anggaran yang dimiliki pemerintah saat ini akan memainkan peranan yang vital. Dalam menanggapi ancaman – ancaman yang datang keterhadiran anggaran mutlak perlu, oleh karena itu dalam perjalanannya pembangunan MEF sendiri akan bergantung pada ketersediaan anggaran, dan dikarenakan anggaran tersebut bersifat terbatas maka, asas prioritas berlaku sesuai urgensinya. Disamping itu

---

<sup>29</sup> Graham Allison, *Essence of decision: explaining the Cuban missile crisis*, (Little Brown : Boston, 1971).

<sup>30</sup> Robert Jervis, 1982. *Deterrence and Perception* dalam *International Security* Vol 7, No. 3. (The MIT Press, 1982). Hal 1.



kebijakan MEF sendiri juga akan berlandas pada tujuh hal yaitu;

1. Capacity based planning, yang merupakan pembangunan kekuatan untuk mencapai tingkat tertentu
2. Threat Based Planning, yang merupakan pendekatan ancaman dalam pembangunan kekuatan
3. Flash Point, definisi terhadap wilayah di Indonesia yang memiliki potensi tinggi terjadinya ancaman actual
4. Rematerialisasi, pemenuhan menuju 100% TOP DSPP personel dan materiil TNI
5. Revitaliasi, peningkatan strate satuan yang disesuaikan dengan ancaman di wilayahnya
6. Pengadaan, pembangunan satuan baru yang didalamnya termasuk personel dan alutsistanya

MEF sendiri merupakan sebuah jawaban dari perkembangan lingkungan strategis, yang mengakibatkan Indonesia perlu mengambil langkah dalam peningkatan kapabilitas pertahananya yang dalam hal ini adalah militer. Indonesia

merupakan negara terbesar dan terluas yang ada di Kawasan dengan total populasi 260 juta jiwa dan luas wilayah darat 1.904.569 km<sup>2</sup>, garis pantai 54.716 km<sup>2</sup>, yang berbatasan dengan 10 negara (tiga diantaranya berbatasan darat) dengan anggaran pertahanan sebesar 6.9 bil USD<sup>31</sup>. Apabila kita mengacu kepada negara dengan luas wilayah terkecil di Kawasan yaitu Singapura namun memiliki tingkat kemakmuran yang tinggi dengan populasi 5.8 juta jiwa anggaran pertahanan 9.7 bil USD<sup>32</sup>.

Morgenthau dalam tulisanya menulis bahwa elemen – elemen dari kekuatan nasional terdiri dari geografi, sumber daya alam, kapasitas industri, kesiapan militer, populasi, karakter bangsa, moral bangsa, dan kualitas diplomasi. Elemen – elemen kekuatan nasional merupakan sebuah potensi negara, yang harus dilindungi dan dimanfaatkan, dengan mengingat kapasitas Indonesia yang besar<sup>33</sup>. Sehingga elemen kekuatan nasional tersebut akan memiliki potensi untuk

---

<sup>31</sup> Global Fire Power, “Indonesia Military Strength”, dalam [https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country\\_id=indonesia](https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=indonesia) diakses pada 28 November 2018

<sup>32</sup> Global Fire Power, “Singapore Military Strength” dalam <https://www.globalfirepower.com/country->

[military-strength-detail.asp?country\\_id=singapore](https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=singapore) diakses pada 28 November 2018

<sup>33</sup> Francis P. Sempa.”Hans Morgenthau And The Balance of Power in Asia”, dalam <https://thediplomat.com/2015/05/hans-morgenthau-and-the-balance-of-power-in-asia/>, diakses pada 7 Juli 2018.

mendukung kepentingan nasional negara, serta merupakan potensi target ancaman yang dapat merusak elemen – elemen kekuatan nasional tersebut. Oleh karena itu Kebijakan MEF dapat dilihat sebagai sebuah kebijakan yang membangun postur pertahanan negara, demi menjaga elemen – elemen kekuatan nasional, namun di satu sisi juga merupakan motor dari terwujudnya kebijakan MEF itu sendiri. Oleh karena dalam dunia yang *borderless* saat ini, perubahan dalam lingstra dan konstelasi ancaman merupakan hal yang dapat mengganggu potensi – potensi kekuatan nasional Indonesia.

Mengacu kepada data yang dilansir oleh *globalfirepower*, Indonesia menempati urutan nomor 1 di Asia Tenggara terkait kekuatan Militer, yang disusul oleh Vietnam, Thailand, Myanmar, Malaysia, Philipines, Singapura, Kamboja, dan Laos<sup>34</sup>. Sedangkan dalam tatanan Global Indonesia menempati urutan 15, namun hal tersebut perlu relevan dengan elemen – elemen kekuatan nasional yang dilindungi yang mana dalam hal ini Singapura yang merupakan negara

dengan luas teritori yang jauh lebih kecil dari Indonesia memiliki anggaran pertahanan yang lebih besar. Mengacu kepada data yang dilansir oleh *globalfirepower*, Indonesia menempati urutan nomor 1 di Asia Tenggara terkait kekuatan Militer, yang disusul oleh Vietnam, Thailand, Myanmar, Malaysia, Philipines, Singapura, Kamboja, dan Laos<sup>35</sup>. Sedangkan dalam tatanan Global Indonesia menempati urutan 15.

Alokasi anggaran Singapura di tahun 2018 memang terfokus pada kebutuhan domestik seperti *tax hike* atau transportasi, namun Singapura merupakan negara di Kawasan yang memiliki anggaran pertahanan yang besar apabila dibandingkan dengan GDP nya. Singapura memiliki anggapan bahwa sebagai negara yang kecil namun memiliki kemampuan ekonomi yang mumpuni sudah menjadi hal yang wajar. Singapura saat ini sudah memiliki instrument militer yang modern dan kapabel di Kawasan dengan anggaran yang besar baik secara regional maupun global dari pengeluaran militer dan pertahananya<sup>36</sup>. Menteri pertahanan Singapura Ng Eng Hen akan

---

<sup>34</sup> Global Fire Power, “South East Asia” dalam <https://www.globalfirepower.com/countries-listing-southeast-asia.asp>, diakses pada 28 November 2018.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup>Pranath Parameswaran, *What’s Behind Singapore’s New Defense Budget Numbers*, dalam <https://thediplomat.com/2018/02/whats-behind-singapores-new-defense-budget-numbers/>, diakses pada 28 Desember 2018.

menyatakan bahwa anggaran pertahanan Singapura akan di kelola di angka 3-4 % yang bergantung pada tingkat inflasi dan tantangan keamanan yang datang, namun jumlah perbandingan itu terhitung cukup besar mengingat anggaran pertahanan Indonesia yang berkisar 0.8-1 % dari APBN<sup>37</sup>.

Dinamika yang terjadi di Asia Tenggara, yang mana merupakan Kawasan yang strategis di mata dunia yang dipengaruhi oleh para *major powers*. Negara – negara di Asia tenggara secara historis memiliki anggaran pertahanan yang tinggi sebagai hasil dari beberapa pertimbangan yaitu kemandirian dalam keuangan, kontrol terhadap territorial, ekspansi kapabilitas, misi – misi di masa damai, dan pengembangan industri pertahanan lokal<sup>38</sup>. Sementara itu beberapa negara di asia tenggara seperti Kamboja dan Filipina adalah negara yang memiliki ketergantungan di Kawasan terhadap dua kekuatan besar di dunia, Uni Soviet dan Amerika Serikat yang pada saat itu menjadi *proxy* dalam perang dingin. Hal yang sama juga terjadi terhadap Myanmar pasca penerimaan bantuan militer dari Tiongkok, yang mana dalam prosesnya

Myanmar sendiri berusaha untuk mengurangi ketergantungannya dengan Tiongkok yang kemudian berusaha mencari alternatif dari Rusia atau Israel.

Dinamika ancaman sendiri sebagai hasil dari kebangkitan *non-state aktor* semenjak beberapa dekade yang lalu menjadi perhatian dari banyak pihak yang memperluas spektrum ancaman. Terutama di Kawasan asia tenggara dimana gelombang insurgensi meningkat di beberapa tahun ke belakang seperti yang terjadi di Myanmar dan Filipina Selatan. Walaupun Filipina selatan sudah memiliki sejarah konfrontasi bersenjata yang berumur 45 tahun dari beberapa kelompok pemberontak yang mendapat dukungan dari Moro, konflik yang terjadi di Marawi pada akhir mei 2017 membuka tantangan baru pembangunan stabilitas dan pertahanan Kawasan yang secara spesifik terfokus pada *rural counter-insurgency*. Filipina sendiri yang walaupun dengan dukungan AS di bidang logistic, intelligent, dan *special force-advisers* membutuhkan waktu 5 bulan untuk memenangkan pertempuran tersebut yang memakan korban sekitar 900 insurgen. Yang mengkhawatirkan adalah

---

<sup>37</sup>Adityo Nugroho, *Anggaran Pertahanan RI Masih Jauh Dari Ideal, dalam* <https://keamanan.rmol.co/read/2018/03/19/3313>

49/Anggaran-Pertahanan-RI-Masih-Jauh-Dari-Ideal-, diakses pada 28 Desember 2018.  
<sup>38</sup><http://www.eastasiaforum.org/2018/05/25/whats-behind-southeast-asias-high-military-spending/>

partisipasi dari pemberontak yang terdiri dari kelompok Abu Sayyaf yang memiliki aliansi dengan ISIS dengan konstelasi pemberontak asing yang tidak hanya datang dari Indonesia, namun dari negara – negara di Asia Tenggara dan Timur Tengah dengan aliran dana dan dukungan dari ISIS<sup>39</sup>.

Dengan meningkatnya ancaman yang potensial terhadap negara – negara di Kawasan yang khususnya terkait pemberontakan ISIS di Asia Tenggara. Hal ini memberikan stimulus kepada negara – negara di Asia Tenggara dalam bentuk perjanjian kerjasama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina melalui patroli maritim di Laut Sulu. Tidak hanya itu saja patroli udara pun ditambahkan untuk meningkatkan deterring.

Seiring berkembangnya Kawasan dan dinamika ancaman yang terjadi negara – negara di Asia Tenggara mulai meningkatkan kapabilitas keuangannya menuju kemandirian, oleh karena itu kenaikan dalam anggaran pertahanan menjadi hal yang wajar. Namun perlu disadari juga dampak dari perang dingin memberikan ketidakmerataan keekonomian dan kapasitas militer di Asia Tenggara, yang mana kapabilitas militer

terkonsentrasi untuk menangkali konfrontasi dari Indochina dengan menitikberatkan pada kapabilitas kekuatan darat dan udara untuk menangkali insurgensi. Sehingga negara – negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki keekonomian yang cukup prihal modernisasi alutsista yang dihadapkan dengan isu – isu maritim saat ini. Disamping itu perkembangan industri pertahanan negara – negara di Asia Tenggara saat ini belum sampai pada tingkatan yang kompetitif di pasaran global, oleh karena itu Industri pertahanan digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pertahanan domestik dan sumber keuangan yang memiliki alokasi anggaran militer yang cukup besar.

Oleh karena itu kebijakan MEF menjadi hal yang relevan untuk direalisasikan, dan merupakan hal yang perlu dipenuhi oleh Indonesia. Allison dalam bukunya *essence of decision* mengemukakan **Rational Actor Model**. Apa yang dituliskan Allison memosisikan para pengambil keputusan sebagai aktor yang rasional, yang mana dalam hal ini adalah para pengambil keputusan di Kementerian Pertahanan yang terkait dengan Perumusan kebijakan *Minimum*

---

<sup>39</sup> Institute for Strategic Studies (London, England) & International Institute for Strategic Studies.

*The military balance 2018*. (London: Institute for Strategic Studies, 2018) Hal 221.

*Essential Force*. Menurut Allison pengambilan sebuah kebijakan akan berwujud dalam realisasi terhadap tujuan – tujuan yang ingin dicapai, yang dalam hal ini sesuai dengan visi dan misi dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sendiri. Adapun proses pengambilan keputusan akan merefleksikan situasi para pengambil keputusan dalam tataran yang meluas hingga ke pengambil keputusan tingkat tinggi, yang dalam hal ini adalah hal – hal yang menjadi referensi dalam perumusan MEF. *Rational Actor Model* yang ditulis oleh Allison berlandas pada empat konsep dasar, yaitu *goals and objectives*, *alternatifs*, *consequences*, dan *choices*<sup>40</sup>.

Dalam hal perumusan kebijakan *Minimum Essential Force* keempat konsep dasar tersebut peneliti lihat sebagai berikut;

### **Goals and Objectives**

*Goals and Objectives* menurut Allison adalah preferensi dan tujuan yang ingin dicapai oleh para pengambil keputusan berdasar pada pandangan agen – agen tersebut yang dalam hal ini adalah Kementerian Pertahanan Republik

Indonesia. Sudah tersurat dalam visi dan misi Kementerian pertahanan sendiri yang kemudian juga terelaborasi dalam Buku Putih Pertahanan Negara dan Kebijakan Pertahanan Negara dalam hal – hal penyelenggaran pertahanan negara, yang bermuara pada pemenuhan kepentingan – kepentingan nasional Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Yaitu,

- Membangun kekuatan pertahanan yang mampu menghadapi segala ancaman
- Meningkatkan pengamanan di wilayah laut udara dan daratan
- Meningkatkan kerjasama internasional
- Pemberdayaan industri pertahanan
- Pembangunan karakter bangsa

### **Alternatives**

*Alternatifs* sendiri menurut Allison, adalah sebagai agen yang rasional maka para pengambil keputusan harus memilih dari sekian banyak alternatif yang muncul pada situasi tertentu. Namun demikian Allison juga menambahkan bahwa *alternatives* dapat menjadi sebuah pengaruh terhadap *output* sebuah kebijakan yang mana dalam pelaksanaannya kesemua alternatif tersebut dapat saling berhubungan antara satu dan

---

<sup>40</sup> Graham Allison, *Essence of decision: explaining the Cuban missile crisis*, (Little Brown : Boston, 1971)

lainya. Dalam hal ini berdasarkan data yang diambil oleh peneliti, Indonesia selaku negara yang berdaulat, sudah mutlak harus meningkatkan kapabilitas pertahanannya, dengan mengingat kondisi lingstra yang dinamis dan spektrum ancaman yang datang. Dalam pembangunan postur pertahanan negara banyak asupan – asupan dari setiap matra dalam hal pembangunan tersebut, namun dalam prakteknya kesemua asupan tersebut belum terumus secara terarah. Oleh karena itu MEF sendiri yang berdasar pada tri matra terpadu menjadi alternatif yang diambil oleh Kementerian Pertahan Indonesia sebagai landas pembangunan postur pertahanan negara dengan mempertimbangkan referensi – referensi lain yang sudah disebutkan oleh peneliti sebelumnya.

### **Consequences**

Konsep berikutnya yang disampaikan oleh Allison adalah *consequences*, dimana para aktor yang dalam hal ini adalah Kementerian Pertahanan mempertimbangkan konsekuensi yang muncul dari adanya pilihan – pilihan tersebut. Yang mana dalam hal ini perumusan kebijakan MEF akan memberikan konsekuensi yang besar baik secara *inward* maupun *outward*. Secara

*Inward* berdasar dari data yang dikumpulkan oleh peneliti MEF merupakan kebijakan yang syarat anggaran, namun ancaman juga tidak dapat dihadapi tanpa kehadiran anggaran. Oleh karena itu hal tersebut akan melahirkan fenomena *Gun and Butter* dimana satu sisi negara berdaulat harus dapat mempertahankan kedaulatannya (yang dalam hal ini dengan dukungan militer) dan juga negara berdaulat juga harus dapat mensejahterakan masyarakatnya dalam hal diluar pertahanan, dimana untuk Indonesia berdasar pada tujuan nasional Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Berdasar pada data yang didapatkan oleh peneliti, penamaan kebijakan *Minimum Essential Force* dikemas sedemikian rupa untuk menghindari adanya pembentukan opini publik yang negatif dan juga keresahan komunitas internasional. Oleh karena itu *Minimum Essential Force* sendiri sebenarnya terdiri dari dua kata yaitu *Minimum* dan *Essensial* sehingga dalam prakteknya anggaran pertahanan Indonesia meningkat sebanyak 60% dalam semenjak dijalankannya kebijakan tersebut. Disamping itu secara *outward* perkembangan kekuatan militer sebuah negara sudah pasti akan menimbulkan

reaksi dari komunitas internasional, namun dalam hal ini MEF sendiri sudah diarahkan bukan untuk menimbulkan *arms race* namun merupakan sebuah perwujudan *military balancing* sebagai hal yang perlu dipenuhi oleh negara dalam hal pertahanannya, pembangunan persepsi yang positif terkait konsekuensi – konsekuensi tersebut akan peneliti bahas lebih lanjut dalam sub bab berikutnya, dimana diplomasi pertahanan memiliki peranan yang signifikan.

### **Choices**

Konsep berikutnya dalam *Rational Actor Model* adalah *Choices*. *Choices* merupakan pilihan yang diambil oleh para pengambil keputusan, dimana Allison menambahkan pengambilan keputusan tersebut dapat bersifat rumit, atau cenderung *straightforward*. Apabila diimplementasikan dengan kebijakan MEF maka, dalam hal ini pengambilan keputusan MEF akan berdasar pada 3 konsep dasar sebelumnya. Dengan menyadari ragam faktor yang dalam hal ini perlu disadari bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dan aktif, oleh karena itu bentuk *persekutuan* tidak relevan dalam pengambilan perumusan kebijakan yang terkait pertahanan. Hal ini juga yang membuat Singapura saat ini memiliki

alutsista yang *up to date* dikarenakan dukungan dari sekutunya. Namun demikian konsep bebas dan aktif saat ini masih sangat relevan dikarenakan Indonesia dalam peranannya di kancah internasional sebagai negara yang bebas aktif akan memberikan posisi tawar sendiri yang dapat dimanifestasikan melalui aktivitas diplomasi pertahanan yang dilakukan. Terkait oleh hal tersebut, peneliti akan membahas menggunakan *functional theory of regime* yang ditulis oleh Keohane selanjutnya dimana wadah institusi memiliki peranan penting dalam perwujudan kepentingan nasional dalam kerangka kepentingan bersama. Oleh karena itu senada dengan yang disampaikan oleh Allison, dimana para pengambil keputusan akan selalu berusaha untuk mendapatkan hasil yang tinggi dalam sebuah keterbatasan tertentu *value maximilization* dan konsistensi dari para pengambil keputusan terhadap keputusan yang sudah diambil.

Kebijakan MEF yang merupakan sebuah pembangunan postur pertahanan militer merupakan hal yang diperlukan bagi Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Namun seperti yang telah sampaikan diatas bahwa peningkatan kekuatan militer secara otomatis akan

memberikan keresahan pada komunitas internasional, hal ini akan termanifestasi dalam tekanan – tekanan dari luar terhadap Indonesia sendiri disisi lain Indonesia memerlukan bentukan penangkalan ancaman berlandas pada kekuatan militer untuk memberikan efek *deterrence*. Oleh karena itu pilihan dalam pembangunan kekuatan pertahanan perlu diarahkan kepada ranah yang tidak memberikan pandangan negatif bagi aktor lain dengan menggunakan instrumen Diplomasi Pertahanan.

Sebagai negara yang bebas aktif ditengah dinamika lingkungan strategis dan dinamika ancaman yang meluas Indonesia mutlak perlu mengembangkan kekuatan pertahanannya. Senada yang disampaikan Keohane dalam ***Functional Theory of Regime*** yang berangkat dari gabungan dua pandangan yaitu realis dan institusionalis dengan dua argumen dasar yaitu, sistem internasional berisi negara – negara yang egois dan selalu mengutamakan kepentingan pribadi; dan sistem internasional akan selalu berada pada kondisi yang anarkhis<sup>41</sup>. Oleh karena itu demi mengusung kepentingan nasionalnya, negara – negara akan

berusaha untuk menekan negara lain dalam wujud pemenuhan kepentingan nasional negaranya masing. Yang mana hal ini akan membawa negara – negara pada sebuah wujud perlombaan kekuatan militer. Namun bagi Indonesia yang tidak memiliki sekutu, Indonesia juga perlu meningkatkan kekuatan militernya dikarenakan tekanan – tekanan yang datang. Mengingat Indonesia yang berprinsip bebas dan aktif, dalam pemenuhan kepentingan nasionalnya seperti yang dikatakan oleh Keohane dimana sisi institusi akan membuat sebuah keteraturan (*rule*) yang juga memiliki fungsi yang menguntungkan negara – negara sehingga negara – negara di dalam kegoisanya akan bersikap kooperatif.

Hadirnya institusi bukan berarti menghilangkan relevansi dari keberadaan kekuatan militer, namun lebih memberikan negara kapasitas dalam posisi tawar mereka dan penangkalan ancaman melalui efek *deterrence*. Disamping itu Keohane juga menambahkan bahwa dengan adanya wadah institusi, kerjasama antar negara akan berwujud pada hal yang *highly political* dimana negosiasi dibutuhkan

---

<sup>41</sup> Robert Keohane, *Functional Theory of Regime*, Dalam *Berkeley Journal of International Law. Cooperation in International Relations: A*

*Comparison of Keohane, Haas, and Franck.* (1996). Volume 4 Issue 1 Article 5. Hal 225.



didalamnya untuk mewujudkan sebuah kepentingan Bersama sehingga terjadi perubahan perilaku dari negara – negara tersebut yang Keohane tulis sebagai *mutual adjustment of behaviour*. Oleh karena itu melalui perumusan MEF Indonesia akan memiliki posisi tawar dalam perpolitikan internasional yang akan membantu Indonesia dalam pemenuhan kepentingan nasionalnya selain efek *deterrence* yang dihasilkan sebagai *output* dari pengembangan kapabilitas pertahanan. Namun untuk mendapatkan hal tersebut Indonesia juga memerlukan instrument penting dalam berhubungan dengan negara – negara lainnya, dalam hal yang terkait dengan pertahanan instrument tersebut adalah Diplomasi Pertahanan.

### **Diplomasi Pertahanan Terhadap Kebijakan *Minimum Essential Force***

Pada akhirnya diplomasi merupakan instrument yang penting dimana negara – negara dapat bergerak dalam sebuah institusi dalam rangka kerja sama. Ditengah pemenuhan negara akan kepentingan nasionalnya akan terjadi banyak persetujuan kepentingan. Oleh karena itu hubungan antar negara

merupakan hal yang vital. Apabila mengacu pada yang disampaikan oleh Martin Griffiths dan Terry O’Callaghan, **diplomasi** sendiri merupakan sebuah aktivitas hubungan asing kepada negara lain yang dapat berwujud dalam bentukan sebuah kerja sama, atau kepada negara yang berposisi sebagai penyelesaian konflik<sup>42</sup>. Dengan adanya kekuatan nasional seperti yang disampaikan oleh Morgenthau, kekuatan diplomasi negara memiliki peranan yang penting dalam menentukan arah serta tujuan terhadap kepentingan yang ingin dicapai. Oleh karena itu ditengah situasi lingkungan internasional yang anarkhis, maka peranan diplomasi adalah vital, dalam membangun kerjasama untuk memenuhi kepentingan Bersama dan juga sebagai langkah pencegahan konflik.

Dengan diberlakukannya kebijakan *Minimum Essential Force* Indonesia membangun postur pertahanan negaranya guna memenuhi kepentingan nasional Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Namun dalam prosesnya, pembangunan kekuatan tersebut tidak akan tercapai tanpa kehadiran Diplomasi Pertahanan.

---

<sup>42</sup> Martin Griffiths, O’Callaghan, Terry & Roach, C. Steven, *International Relations: The Key*

*Concepts Second Editions*, (New York: Routledge, 2008). Hal 79.

Diplomasi pertahanan sendiri merupakan perwujudan dari *non-violence use of military power*, oleh karena itu segala aktivitas dalam diplomasi pertahanan tidak akan pernah lepas dari elemen militer di dalamnya. Senada yang disampaikan oleh Gregory Winger dalam tulisannya *The Velvet Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy* dimana aktivitas diplomasi pertahanan merupakan elemen militer yang digunakan dalam praktik diplomasi, yang dalam hal ini dapat berwujud dalam pertukaran perwira, atau kunjungan kapal yang pada akhirnya merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam memenuhi kepentingan nasional negara. Oleh karena itu peningkatan dalam elemen militer negara akan memperkuat dan memberikan posisi tawar yang lebih dalam aktivitas Diplomasi Pertahanan yang dilakukan.

Dalam konstelasi internasional saat ini dimana negara akan berlomba – lomba dalam pemenuhan kepentingan nasionalnya dalam kondisi yang anarkhis, dan seperti yang disampaikan oleh Keohane dimana peranan institusi akan memberikan negara sebuah alasan untuk

bekerjasama dalam memenuhi kepentingan nasionalnya, maka Diplomasi Pertahanan sebagai alat negara dalam bernegosiasi terkait hal – hal yang berhubungan dengan pertahanan, dapat memberikan sumbangsih besar terhadap realiasi kebijakan MEF. Dalam tulisannya, Winger juga menambahkan elemen penting yang dalam Diplomasi Pertahanan. Apabila peningkatan kekuatan militer dapat diklasifikasikan sebagai pembangunan elemen *hard power*, Diplomasi Pertahanan yang ditulis Winger, memiliki kaitan yang erat dengan *soft power*<sup>43</sup>.

Dalam tulisannya Winger mengutip pandangan Joseph Nye dalam *The Future of Power*, terkait dimana *soft power* dapat diutilisasikan oleh negara, yang pertama adalah *indirect model*, ***indirect model*** sendiri merupakan proses mempengaruhi publik untuk mengukung sebuah kebijakan tertentu. Hal ini tersurat dalam kebijakan *Minimum Essential Force* sendiri dimana dimulai diskursus mengenai pembangunan kekuatan pertahanan yang akan dilakukan oleh Indonesia, dalam hal penamaanya yang telah penulis sebut sebelumnya, penamaan *Minimum Essential*

---

<sup>43</sup> Gregory Winger. *The Velvet Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy*, dalam <http://www.iwm.at/publikations/5-junior->

[visiting-fellows-conferences/vol-xxxiii/the-velvet-gauntlet/](http://www.iwm.at/publikations/5-junior-visiting-fellows-conferences/vol-xxxiii/the-velvet-gauntlet/), diunduh pada 6 Juni 2018.

Force dalam pembangunan postur kekuatan negara, salah satu tujuannya secara kedalam adalah agar publik mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan tidak menimbulkan keresahan terkait fenomena *Gun and Butter*. Disamping itu kita juga dapat melihat hal tersebut dalam operasi militer selain perang, seperti yang peneliti tulis di dalam hasil penelitian, dimana TNI akan selalu menjadi ujung tombak apabila ada ancaman yang datang, apabila ancaman tersebut tidak dapat diselesaikan oleh *stakeholder* yang lain. Dalam hal ini yang dapat dijadikan contoh adalah *humanitarian and disaster relief (HADR)*, dimana TNI menjadi ujung tombak dalam semua operasi – operasi kemanusiaan tersebut. Hal ini dikarenakan TNI merupakan unit yang selalu siap siaga, professional, dan memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Dalam hal ini TNI yang melakukan OMSP merupakan agen dari Diplomasi Pertahanan, oleh karena itu apabila upaya Diplomasi Pertahanan yang dilakukan efektif menyentuh publik, hal tersebut akan termanifestasi terhadap persetujuan publik terhadap keputusan pemerintah

dalam mewujudkan pembangunan kekuatan pertahanan. Hal ini juga kita bisa lihat dalam proyek – proyek infrastruktur terkait pembangunan umum yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti misalnya pembangunan jalan tol trans papua, dalam hal ini terjadi koordinasi antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan elemen militer terkait kondisi dan situasi yang terjadi di lapangan<sup>44</sup>. Oleh karena itu pengembangan – pengembangan pembangunan yang terjadi di Indonesia tidak akan pernah lepas dari kebutuhan militer untuk hadir dan memberikan sumbangsih baik informasi, pengamanan, dan atau turun langsung untuk membuka jalan bagi *stakeholder* lain guna terpenuhinya kepentingan yang ingin dilakukan. Hal – hal tersebut akan terefleksi dengan kapasitas TNI dalam menanggapi permintaan – permintaan *stakeholder* tersebut yang mana diantaranya juga ada masyarakat yang melihat profesionalisme TNI di lapangan dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga perubahan opini dapat terbentuk menuju pembangunan postur pertahanan militer sebagai

---

<sup>44</sup>Angling Purbaya, “Mau Digeber Lagi, Proyek Trans Papua Tunggu Saran TNI/ Polri” dalam <https://finance.detik.com/infrastruktur/d->

[4340404/mau-digeber-lagi-proyek-trans-papua-tunggu-saran-tnipolri](https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4340404/mau-digeber-lagi-proyek-trans-papua-tunggu-saran-tnipolri), diakses pada 20 Februari 2019.

bentukan Diplomasi Pertahanan Indonesia.

Model yang kedua yang dituliskan oleh Winger berdasar pada pemikiran Joseph Nye adalah *Direct Model*, **Direct Model** sendiri merupakan pertemuan langsung antara perwakilan pemerintah untuk bernegosiasi atau membahas agenda tertentu. *Direct model* ini sendiri dapat terefleksikan melalui data peneliti melalui kehadiran Indonesia di ADMM/ADMM+ sebagai sebuah wadah dialog pertahanan di Asia Tenggara dengan turunannya yaitu ACAMM dan ADSOM. Kehadiran Indonesia disana merupakan perwujudan Diplomasi Pertahanan di Kawasan, dengan mengingat bahwa ADMM memiliki *expert working group* nya sendiri yang terdiri dari *Counter Terrorism, humanitarian act and disaster relief, maritime security, military medicine, peacekeeping operation, humanitarian mine action, and cyber security*.<sup>45</sup> Dalam hal ini pemerintahan yang memiliki kekuatan nasional yang besar, yang secara khusus terkait pertahanan akan memiliki posisi tawar yang lebih baik, sehingga akan dapat

memberikan pengaruh kepada otoritas negara lain agar selaras dengan kepentingan nasional Indonesia. Menyambung yang disampaikan oleh Keohane, peranan wadah atau institusi akan memiliki hal yang signifikan, oleh karena itu kekuatan diplomasi negara akan menjadi faktor yang diperhitungkan dalam perubahan sikap demi menuju pembentukan kepentingan Bersama. Oleh karena itu kebijakan MEF, dalam pembangunan postur pertahanan negara baik secara *direct* maupun *indirect*, Diplomasi Pertahanan Indonesia akan memainkan peran yang sangat signifikan

Selain Winger untuk menjawab rumusan masalah terkait peran Diplomasi Pertahanan terhadap MEF, peneliti juga menggunakan teori Diplomasi Pertahanan yang ditulis oleh Idil Syawfi dalam tulisannya. Syawfi menyampaikan bahwa Diplomasi pertahanan merupakan sebuah Instrumen negara, yang dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan internasional baik dalam kerjasama bilateral maupun multilateral<sup>46</sup>. Apa yang disampaikan oleh Syawfi ini memiliki irisan dengan yang disampaikan oleh Winger,

---

<sup>45</sup>ASEAN. Concept Paper on Streamlining ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM)- Plus Expert's Working Group (EWGS), (ASEAN : 2017)

<sup>46</sup> Idil Syawfi, *Aktifitas Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam*

*Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), Hal 34.

dimana aktivitas diplomasi pertahanan Indonesia dapat dilihat dari kegiatan Indonesia di wadah pertahanan regional, seperti ADMM/ ADMM+ yang sudah peneliti bahas di atas. Disamping itu Syawfi juga menambahkan bahwa Diplomasi Pertahanan juga merupakan bagian dari alat kebijakan pertahanan guna mewujudkan kerjasama pertahanan, dan Diplomasi pertahanan digunakan untuk mengurangi ketidakpastian yang muncul dalam interaksi negara, hal ini memiliki irisan seperti yang disampaikan oleh Keohane dalam pandangan realis institusionalisnya, dimana sistem internasional akan selalu berada dalam keadaan yang anarkhis, oleh karena itu, diperlukan instrument yang menyatukan negara dalam sebuah wadah, yang dalam hal ini terkait pertahanan, adalah diplomasi pertahanan sebagai instrumennya.

Lanjut Syawfi menambahkan Diplomasi Pertahanan memiliki tiga fungsi yaitu, *Confidence Building Measure*, *Defense Capabilities*, *Defense Industries*. ***Confidence Building Measure*** merupakan pembangunan rasa kepercayaan antar satu negara dengan negara lainya sehingga melahirkan *conflict prevention* disamping itu CBM juga dapat berwujud kepada pencitraan negara yang berujung

pada efek *deterrence* untuk menangkal ancaman yang datang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat bahwa dengan meningkatnya postur pertahanan militer melalui kebijakan MEF, Indonesia lebih memiliki berat dalam aktivitas Diplomasi pertahanan yang dilakukan, namun dalam perjalanannya pengembangan kekuatan pertahanan (militer) bukan tanpa asumsi – asumsi yang dapat menimbulkan kebangkitan *arms race* dalam perwujudan efek *deterrence* dalam penangkalan ancaman. Dalam tulisan Robert Jervis yang bertajuk ***Deterrence and Perception*** ia menyampaikan bahwa ada dua hal yang membuat efek *deterrence* menjadi salah sasaran yang justru memiliki akibat yang berbalik kepada negara itu sendiri, dua hal tersebut adalah (*mis*) *perception of value* dan (*mis*) *perception of credibility*. Indonesia merupakan negara yang memiliki batasan langsung dengan 10 negara di kawasan, dimana tiga di antaranya memiliki batasan darat. Dalam hal penangkalan ancaman yang datang baik militer, nir militer, dan hibrida efek *deterrence* akan memainkan peranan yang penting. Namun kesalahan persepsi terhadap peningkatan kekuatan pertahanan akan menimbulkan keresahan bagi negara – negara tetangga. Terutama

terkait nilai – nilai yang diusung oleh Indonesia dalam rangka peningkatan kekuatan pertahanannya. Oleh karena itu seperti yang peneliti sudah sampaikan di atas, dimana aktivitas Diplomasi pertahanan Indonesia dalam wadah pertahanan regional (*direct model winger*) dan upaya – upaya penanggulangan problematika publik (*indirect model winger*) akan menghilangkan kesalahan persepsi terhadap dasar dan tujuan Indonesia dalam meningkatkan kapabilitas pertahanannya melalui pembangunan rasa saling percaya (CBM).

Aktor – aktor diplomasi pertahanan sendiri, lebih memiliki kepercayaan diri ketika bertemu dengan aktor diplomasi pertahanan dari negara lain. Hal ini memberikan input berupa meningkatnya kepercayaan antar negara, dan juga menimbulkan efek *deterrence* yang lebih tinggi dan terarah untuk menangkal ancaman. Hal – hal tersebut terefleksi dari kegiatan – kegiatan diplomasi pertahanan Indonesia dalam kerangka *joint patrol*, *joint exercise*, *disaster relief*, dan kegiatan diplomasi pertahanan lainnya yang dapat memberikan pencitraan dan *input* positif bagi Indonesia.

Disamping itu fungsi Diplomasi Pertahanan yang berikutnya adalah *Defense Capabilities*, ***Defense Capabilities***

sendiri merupakan pembangunan kekuatan negara yang dapat menangkal ancaman – ancaman (*deterrence*) seperti yang didefinisikan oleh Buku Putih Pertahanan Negara. Diplomasi pertahanan merupakan instrumen penting dalam pemenuhan MEF itu sendiri. Namun dalam perjalanannya negara yang kuat secara militer, dan mampu menangkal ancaman, akan memiliki posisi tawar yang lebih tinggi, sehingga Diplomasi Pertahanan yang dilakukan oleh negara tersebut dapat lebih berat dalam mengarahkan persepsi apabila didukung oleh kapabilitas militer yang handal sebagai bentukan persepsi terhadap kredibilitas suatu negara untuk menghindari (*mis*) *perception of credibility*. Dalam hal ini Jervis menuliskan bahwa persepsi terhadap kredibilitas dalam langkah negara akan berkaitan erat dengan kekuatan nasional negara, reputasi negara tersebut, bagaimana sisi historis negara tersebut dalam merespon dinamika internasional dan nasionalnya, dan tingkatan *deterrence* yang diambil oleh negara tersebut. Oleh karena itu apabila menilik konstelasi kekuatan yang ada di kawasan saat ini (Diagram 4.1). Untuk dapat memberikan efek *deterrence* yang efektif Indonesia juga memperhitungkan banyak hal termasuk di dalamnya kembali kepada pertanyaan

apakah kekuatan pertahanan (militer) Indonesia saat ini cukup kredibel untuk dapat memberikan efek tersebut baik secara *hard, soft dan smart*. Oleh karena itu kapabilitas pertahanan perlu selalu di kelola secara guna menanggapi ancaman dan persepsi secara aktual melalui penyeimbangan persepsi diantara keduanya. Dari hal tersebut peneliti melihat bagaimana pembangunan CBM dan *defense capabilities* dapat difasilitasi oleh instrumen Diplomasi Pertahanan untuk menghindari mispersepsi asing terhadap langkah *deterrence* Indonesia.

Berikutnya terkait Diplomasi Pertahanan yang disampaikan oleh Syawfi adalah **Defense Industry**. Dari hasil penelitian, peneliti menyadari bahwa *Defense Industry* Indonesia semenjak berjalanya kebijakan MEF memiliki permintaan yang tinggi, dan bahkan tidak dapat memenuhi permintaan dalam negeri sendiri. Industri Pertahanan merupakan sektor vital bagi pembangunan kekuatan pertahanan negara dikarenakan selain memiliki sisi ekonomi yang tinggi, bidang industri dapat berkontribusi pada kemajuan teknologi. Semenjak dicanankanya MEF, bidang industri pertahanan Indonesia mengalami asupan *transfer of technology*, *transfer of knowledge*, dan kerjasama litbang yang meningkat. Dengan adanya

plot anggaran akibat dirumuskanya kebijakan MEF, dan meningkatnya permintaan pengadaan alutsista, maka banyak Indhan asing yang menawarkan produk – produknya kepada Indonesia, dan menilai bahwa Indonesia merupakan pasar yang menjanjikan. Dikarenakan hal ini Diplomasi Pertahanan Indonesia terkait Indhan, dapat bergerak lebih leluasa, dikarenakan terjadi kompetisi antara indhan asing yang membuat Indonesia lebih mudah bernegosiasi. Hal ini berwujud dalam hal yang sangat vital dalam kontrak jual beli persenjataan yaitu, negosiasi terkait Batasan – Batasan tertentu, seperti alutsista A tidak boleh digunakan kepada negara B, dan atau model embargo negara asing melalui indhan nya. Hal ini juga tidak lepas dari dukungan pemerintah terkait sektor pengadaan yang mengharuskan prioritas pembelian dari industri pertahanan lokal, dan kewajiban pembelian langsung ke pabrik indhan yang bersangkutan apabila spesifikasi yang diinginkan tidak dididapatkan di dalam negeri. Dari hasil penelitian, kebijakan MEF ini sendiri juga memberikan asupan ekonomi dalam hal pemberdayaan bank domestic dalam hal PDN, sebuah model pembayaran baru (yang sebelumnya hanya dari kredit ekspor, dan rupiah murni). Di sisi lain

dengan meningkatnya permintaan alutsista, menjadikan Indonesia pasar, seperti yang pernah ditulis oleh peneliti, sebagai pasar, Indonesia akan memiliki bahan posisi tawar lain, apabila ada negara yang ingin menciptakan distabilitas, dikarenakan produsen akan rugi, apabila Indonesia sebagai pasar dalam posisi yang tidak stabil

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti terkait Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Kebijakan Minimum Essential Forces di Kementerian Pertahanan, yang dibahas menggunakan teori yang digunakan oleh peneliti, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa;

a. Kebijakan Minimum Essential Force yang merupakan kebijakan pembangunan postur kekuatan militer dengan tujuan untuk membangun kekuatan pertahanan negara. Dalam hal menangkal dan menanggulangi ancaman – ancaman yang datang melalui pengeololaan dan peremajaan elemen – elemen dari kekuatan pertahanan secara aktual. Dalam hal penangkalan ancaman, pembangunan kekuatan pertahanan negara (militer) akan memiliki kaitan yang erat dengan

sumber – sumber kekuatan negara yang mana diantara keduanya akan memiliki sifat yang relatif, apabila sumber – sumber kekuatan nasional bersifat terbatas, maka dalam realisasi pembangunan postur pertahanan negara akan terbatas pula. Namun pembangunan kekuatan pertahanan dapat terwujud melalui utilisasi instrumen diplomasi pertahanan, dimana Diplomasi Pertahanan membuka banyak peluang dan meminimalisir tantangan dalam hal pembangunan kekuatan pertahanan negara.

b. Instrumen Diplomasi pertahanan yang merupakan non-violence use of military power teroptimaliasi melalui perumusan kebijakan MEF. Yang didalamnya terdapa elemen – elemen yang dapat mempengaruhi opini publik dan internasional, melalui direct dan indirect model, dan melalui pembangunan Confidence Building Measure, Defense Capabilities, dan, Defense industries. Dalam hal ini peneliti juga menyadari bahwa Minimum Essential Force diarahkan untuk memberikan efek deterrence yang syarat unsur persepsi di dalamnya, dimana aktivitas Diplomasi Pertahanan dapat menjembatani persepsi asing dan



domestik melalui pembangunan CBM, partisipasi Indonesia dalam wadah pertahanan regional, hubungan bilateral, multilateral, dan relasi publik – militer dalam kerangka OMSP. Oleh karena itu Diplomasi Pertahanan menunjukkan signifikansinya sebagai pembentuk persepsi yang menangkal ancaman, dan juga pelurusan opini dalam rangka pembangunan kekuatan pertahanan negara.

### **Rekomendasi**

Dari kesimpulan yang telah diambil oleh peneliti, peneliti akan menyampaikan beberapa rekomendasi terkait rekomendasi teoritis dan rekomendasi praktis

### **Rekomendasi Teoritis**

Secara teoritis peneliti memberikan rekomendasi bahwa diplomasi pertahanan merupakan bidang ilmu yang memiliki cakupan yang luas terkait aspek – aspek kenegaraan. Terlepas dari diplomasinya sendiri, diplomasi pertahanan penting untuk dapat melihat relasi dan respon negara terkait isu – isu keamanan dan pertahanan yang datang dari luar maupun dalam negeri.

### **Rekomendasi Praktis**

Saat ini pembangunan kekuatan pertahanan tidak akan lepas dari aktivitas diplomasi di dalamnya. Spesifik terkait Diplomasi Pertahanan, adalah instrumen vital yang sudah sewajarnya dimiliki oleh negara dan selalu diperkuat. Menguatnya Diplomasi Pertahanan akan mendorong terealisasinya kekuatan pertahanan yang handal. Dan kekuatan pertahanan yang handal tidak akan terlepas dari respon internasional dan publik, dimana kedua hal tersebut masuk ke dalam ranah gerak aktivitas diplomasi pertahanan negara. Oleh karena itu dalam praktiknya Diplomasi Pertahanan akan menjembatani dan membangun persepsi yang linear terhadap pemenuhan kepentingan nasional.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Allison, G. (1971). *Essence of decision; explaining the Cuban missile crisis*. Boston: Little, Brown.
- Burridge, G.R and Alan James. (2003). *A Dictionary of Diplomacy Second Edition*. Palgrave Macmillan.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Los Angeles: Sage.
- Griffiths, Martin, O’Callaghan, Terry & Roach, C. Steven. (2008). *International Relations: The Key Concepts Second Editions*. New York: Routledge.

Kementerian Pertahanan Republic Indonesia. "Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015".

Nye, J. S. (2011). *The future of power*. New York: PublicAffairs.

Thucydides, Warner, R., & In Finley, M. I. (1972). *History of the Peloponnesian War*. Harmondsworth, Eng: Penguin Books.

### **Jurnal**

Codevilla, Angelo.M.2018. *Tools of Statecraft: Diplomacy and War*.

Jervis, Robert.1982. *Detterence and Perception dalam International Security* Vol 7, No. 3. The MIT Press.

Keohane, Keohane. "Functional Theory of Regime" *Dalam Berkeley Journal of International Law. Cooperation in International Relations: A Comparison of Keohane, Haas, and Franck*. (1996). Volume 4 Issue 1 Article 5.

Marks, Sally & Chas W. Freeman.2019. *Diplomacy*.  
<https://www.britannica.com/topic/diplomacy>. Diakses pada 27 November 2018.

Sudarsono, Juwono. *Dalam Keynote Speech Professor Juwono Sudarsono di Indonesia Programme At The S. Rajaratnam School Of International Studies yang bertajuk Transforming The Indonesian Armed Forces* 2011.

### **Perundang – undangan**

*Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008)*.

*Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 terkait penyalarsan Minimum Essential Force*.

*Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.

### **Website**

Global Fire Power. 2018. *Indonesia Military Strength*.  
[https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country\\_id=indonesia](https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=indonesia) diakses pada 28 November 2018.

Global Fire Power. 2018. *Singapore Military Strength*.  
[https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country\\_id=singapore](https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=singapore) diakses pada 28 November 2018.

Global Fire Power. 2018. *South East Asia*.  
<https://www.globalfirepower.com/countries-listing-southeast-asia.asp>, diakses pada 28 November 2018.

Hakim, Syaiful.2018. *Panglima TNI: MEF 2019 Capai 72 Persen*".  
[https://sumbar.antarane.ws.com/nasional/berita/755153/panglima-tni-mef-2019-capai-72-persen?utm\\_source=antaranews&utm\\_medium=nasional&utm\\_campaign=antaranews](https://sumbar.antarane.ws.com/nasional/berita/755153/panglima-tni-mef-2019-capai-72-persen?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews) diakses pada 25 november 2018.

Hermanta.2018.*TNI Targetkan Akhir 2019 Akan Capai 72% MEF*.  
[http://rri.co.id/pontianak/post/berita/580514/daerah/tni\\_targetkan\\_akhir\\_2019\\_akan\\_capai\\_72\\_mef.html](http://rri.co.id/pontianak/post/berita/580514/daerah/tni_targetkan_akhir_2019_akan_capai_72_mef.html), diakses pada 29 November 2019.

Nugroho, Adityo. 2018. *Anggaran Pertahanan RI Masih Jauh Dari Ideal*,  
<https://keamanan.rmol.co/read/2018/03/19/331349/Anggaran-Pertahanan-RI-Masih-Jauh-Dari-Ideal-> diakses pada 28 Desember 2018.

Parameswaran, Prashanth." *What's Behind Singapore's New Defense Budget Number*", dalam  
<https://thediplomat.com/2018/02/whats-behind-singapores-new-defense-budget-numbers/> diakses pada 8 Agustus 2018.

Purbaya, Angling Adhitya. 2018. *Mau Digeber Lagi, Proyek Trans Papua*

Tunggu Saran TNI/ Polri.  
<https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4340404/mau-digeber-lagi-proyek-trans-papua-tunggu-saran-tnipolri> diakses pada 20 Februari 2019.

Sempa, Francis P."Hans Morgenthau And The Balance of Power in Asia, dalam <https://thediplomat.com/2015/05/hans-morgenthau-and-the-balance-of-power-in-asia/>, diakses pada 7 Juli 2018.

